

**IMPLEMENTASI PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM MENURUT FIQH
SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN (Studi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik
Bukit Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tujuan dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Istikhorotus Solikhah

1521020223

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM MENURUT FIQH SIYASAH DAN UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Peran** adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.¹
2. **Polisi Kehutanan** adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. **Perlindungan Hutan** adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3. – Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, H 349

penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi hutan, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

4. **Konservasi Alam** adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang.²
5. **Fiqh Siyasah** adalah ilmu Hukum Tata Negara yang secara sfeksifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Beberapa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Negara yang dijalani suatu bangsa.³
6. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999** Merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam yang mendominasi pepohonan dalam persekutuan Alam Lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dimaksudkan dengan judul skripsi
: **“PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM MENURUT FIQH SIYASAH DAN UU NO**

² Undang-Undang *KEHUTANAN DAN ILEGAL LOGGING*, Bandung, FokusMedia, 2014, H226

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Mendia Group, 2014) H 3-4

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) H 70

41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Study Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)” adalah untuk mengkaji Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Peran Polisi Kehutan dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah dan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ”, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. banyak terjadinya kebakaran Hutan yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti sebab terjadinya kebakaran Hutan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah diatur tentang perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sehingga perlu pengkajian melalui peran Polisi kehutanan dalam perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sehingga dapat dikaji secara terperinci.
- c. Dekatnya objek penelitian dari kediaman penulis.

d. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara lebih terperinci, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi Sumber Daya Alam Hayati dan didominasi pepohonan dalam pesekutuaan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵

Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.⁶

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai Warisan Dunia. Bukit Barisan Selatan dinyatakan sebagai Cagar Alam Suaka Margasatwa pada tahun 1935 dan menjadi Taman Nasional pada tahun 1982. Pada awalnya ukuran Taman adalah seluas 356.800 hektare . Tetapi luas taman saat ini yang dihitung dengan menggunakan GIS kurang-lebih 324.000 hektare.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu terletak di ujung wilayah barat daya Sumatera. Sekitar 70 persen dari taman (249.552 hektare) termasuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Lampung Barat dan wilayah Kabupaten Tanggamus, di mana keduanya adalah bagian dari Provinsi Lampung. Bagian lainnya dari taman mencakup 74.822 hektare (23 persen

⁵ Pasal 1 Ayat UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁶ Zain, Alam Setia. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. (Jakarta), Penerbit ; Rineka Cipta, H 41.

dari luas taman keseluruhan) berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kawasan hutan TNBBS mulai banyak berkurang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan permukiman dan pembukaan jalan pada masa lalu.

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia saja, didalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, atau hubungan manusia dan manusia saja, Namun islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

*"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: Ayat 41)*⁷

⁷ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS. Ar-Rum [30]: Ayat 41) hlm 409

Allah melarang secara tegas merusak Bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mrngeksplotasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan akan berakibat kepada lingkungan.

Hukuman dari perbuatan itu adalah dijatuhi pidana takzir, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk keselamatan rakyatnya. Hukuman pun merupakan kewenangan dari pihak pemerintah. Majelis ulama dalam memutuskan tentang Alam Lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *al-siyasah al syar'iyah*/ public policy. Menurut Abdul Wahab Khallaf *Al-siyasah syar'iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan *syara'* dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.⁸

Telah muncul berbagai kerusakan didunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-lapal selam. Hal itu tiada lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia berupa kedzaliman, banyaknya lenyapnya perasaan dari

⁸ Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 5.

pengawasan Allah SWT. Dan mereka melupakan sama sekali akan hari hisab, hawa nafsu terlepas dari kalangan sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi.

Allah SWT menjelaskan sesudah timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf [07] ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*¹⁰

Polisi adalah alat utama Negara dalam menjaga keamanan. Dalam Negara *khilafah*, urusan keamanan Negara ditangani oleh departemen keagamaan dalam negeri, yang memimpin oleh Direktur keamanan dalam Negeri. Departemen ini mempunyai kantor wilayah di setiap wilayah. Kantor wilayah

⁹ Anwar Rosidi Dkk, Tafsir Al-Maragi, Semarang, 1992, H 99

¹⁰ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS. Al-A'raf [07] ayat 56 hlm 158

keamanan dalam negeri tersebut di pimpin oleh kepala kepolisian diwilayah itu.

Secara hirarki birokrasi, kepala kepolisian yang mengempali kantor Wilayah keamanan dalam Negeri dikeamanan dalam Negeri di suatu wilayah berada dibawah departemen keamanan dalam Negeri, tetapi secara teknis pelaksanaan tugas dilapangan (wilayah) berada di bawah wali (kepala daerah tingkat I). semua fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang khusus. Departemen keamanan dalam Negeri ini juga berhak untuk menggunakan Polisi kapan saja, dimana perintahnya bersifat mengikat.¹¹

Hutan Konservasi adalah Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari, kawasan hutan suaka Alam (KSA), berupa cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM), Kawasan hutan pelestarian alam (KPA) berupa taman nasional (TN), taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam (TWA), dan taman baru (TB).

Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan juga merupakan suatu kumpulan tumbuhan lainnya. Hutan juga merupakan suatu kumpulan tumbuhan yang menempati daerah yang luas. hutan dapat ditemukan baik di daerah yang beriklim tropis maupun daerah beriklim dingin. Hutan memiliki banyak fungsi antara lain sebagai tempat/habitat bagi hewan dan tumbuhan, penampung karbon

¹¹ Hafidz Abdurrahman, *Lanjah Tsaqofiyah DPP HTI Kepolisian Dalam Negara Khilafah*, Jakarta, 2017, H 200

dioksida. Hutan Indonesia merupakan suatu keanekaragaman hayati didunia, dimana Indonesia merupakan urutan ke tujuh Negara yang disebut *Megadiversity country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis Flora Dan Fauna yang banyak diantaranya adalah *endemic* di Indonesia. Dalam, kenyataanya pemanfaatan Hutan Alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasilan devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan Hutan Alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negative tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian Hutan yang diperkuat oleh adanya kebakaran Hutan dan penebangan liar (*ilegal logging*).

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Namun saat ini sebagian hutan Indonesia telah menjadi rusak disebabkan berbagai hal salah satunya usaha pertambangan, selain menimbulkan kerugian sosial dan budaya.¹²

¹² Ibid 44

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peran polisi kehutanan dalam melindungi hutan dan konservasi alam pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Implementasi peran Polisi kehutanan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam?

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan di teliti. Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan berfokus pada peran Polisi kehutan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam.

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Polisi kehutanan dalam melindungi hutan dan konservasi alam pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat
- b. Untuk mengetahui peran Polisi kehutanan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Momor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

G. Signifikansi Penelitian

- a) Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini
- b) Dalam hal ini merupakan sumbangan pemikiran terkait dengan perlindungan hutan dan konservasi alam menurut fiqh siyasah dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang sudah sesuai atau belum menurut peraturan Perundang-Undangan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian daya yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dinalisis, diambil, sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.

1. Jenis Dan Sifat

a) Jenis Penelitian

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang perlindungan hutan dan konservasi alam, termasuk juga data primer hasil interview penulis dengan pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan hutan dan koservasi alam menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), H 2

kehutanan, penulis melakukan wawancara kepada Polisi kehutanan yang bertugas menjaga hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Metode penelitian *kualitatif* sering disebut metode penelitian *naturalistik*, karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau sesuai dengan kondisi dan situasi sesungguhnya. Proses penelitian ini yaitu mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah peran polisi kehutanan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam menurut Fiqh Siyasah perlindungan hutan dan konservasi alam menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Balik Bukit.

b) Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu peneliti ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), H 01.

¹⁵ M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), H 38.

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian Polisi kehutanan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat dalam rangka mendapatkan informasi mengenai peran, upaya, dan kendala dalam perlindungan hutan dan konservasi alam. Data tersebut merupakan obyektif yang ada di lapangan dan tentunya sangat penting untuk menunjang hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.

a. Metode observasi

Metode *observasi* adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

Metode *observasi* merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk

menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat.

b. Metode interview

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian dan dilakukan wawancara terhadap Polisi kehutanan yang bertugas mengelola dan menjaga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat.

c. Metode dokumentasi

Metode *dokumentasi* adalah kumpulan data yang berbentuk variable tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁶

4. Populasi dan teknik sampling

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineks Cipta), H 38

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.

Pengambilan sampel digunakan jenis (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti. Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti. karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yaitu Polisi Kehutanan yang bertugas di taman nasional bukit barisan selatan resort lampung barat. Pertimbangan kriteria ini, karena polisi kehutanan merupakan orang yang bertugas mengawasi dan mengelola taman nasional bukit barisan selatan resort lampung barat.¹⁷

Populasi digunakan untuk menyebut seluruh elemen seluruh anggota dari tempat yang menjadi sasaran penelitian. Sampel berikutnya, yaitu ada 4 Polisi Kehutanan yang bertugas dalam mengelola dan menjaga dan beberapa warga sekitar di taman nasional bukit baraisan selatan resort balik bukit lampung barat diantaranya 1 kepala resort balik bukit lampung barat dan 3 anggotanya. pertimbangannya kriteria ini, karena 4 polisi kehutanan tersebut terlibat aktif dalam proses pengelolaan dan menjaga taman nasional bukit barisan selatan resort lampung barat. Sehingga peneliti sangat membutuhkan data primer dari responden yang tepat.

¹⁷ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta, Setiawan Pers, 1999), H 60

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.¹⁸ Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*,) pengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. penandaan data (*coding*,) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif. Menurut Suharmi Arikunto Analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali. Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011), H.141.

¹⁹ Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung:PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), H.126.

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus atau mengkomperatifkan konsep fiqh siyasah dan hukum fositif.

Jadi karena data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif yang mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰



²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) H 91.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem hamparan lahan berisi Sumberdaya Alam Hayati didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem peyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi penentu umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu :

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan kehidupan dan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- b. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- c. Hutan produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hutan bagi konsumsi

masyarakat. Industri dan ekspor atau dengan kata lain hutan produksi mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.¹

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga hutan di atas dilindungi oleh pemerintah. Dalam buku perlindungan dan pengamanan hutan yang ditulis oleh Mappotoba Sila yang menjelaskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbutan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Dalam halaman yang lain beliau juga memaparkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang diuraikan di bawah ini:

- a. Hasil nabati seperti perkakas, kayu industry, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang

¹ Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 Tentang *Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan* Pasal 5 Ayat (2).

dihasilkan oleh tumbuhan yang berada di dalam hutan, termasuk hasil berupa minyak.

- b. Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.²

Pentingnya perlindungan atau konservasi sebagaimana dijelaskan dalam - dalam buku Fachruddin Majeri Mangunjaya memang sudah lama disadari karena perubahan musim di Indonesia yang kerap kali ekstrem. Terkadang diikuti oleh kebakaran hutan yang menyebabkan masalah lingkungan hingga ke negara tetangga. Pembukaan lahan hutan yang dilakukan dengan cara membakar mengakibatkan masalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Asap dan sisa pembakaran yang ditimbulkan juga merugikan kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang menderita gangguan saluran pernafasan (ISPA). Kerugian dalam bidang pariwisata dan transportasi juga ikut terganggu akibat asap kebakaran hutan.

Memburuknya kondisi lingkungan ini menurut pendapat beliau merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang tidak lagi bersahabat dengan alam, padahal kita mengetahui, bahwa keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan di dunia ini di antaranya sebagai paru-paru dunia, mengendalikan

² Mappatoba Sila, Sitti Nuerani, *Perlindungan Dan Pengamanan Hutan*, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009) Hlm. 2-5.

bencana alam, rumah bagi flora fauna, dan masih banyak lagi. Hutan alam yang tadinya berfungsi sebagai pelindung telah berubah menjadi perkampungan dan tempat tinggal. Sementara itu di hutan-hutan Indonesia masih berlangsungnya pembalakan liar (*illegal logging*) dan pembakaran hutan yang kemudian lebih memperburuk kondisi alam Indonesia karena kawasan-kawasan alami telah turut dicuri kayunya dan diperdagangkan.³

2. Pengertian Konservasi Alam

Konservasi Alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang.⁴

Konservasi Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pelestarian dan pengawetan. Dalam hal ini pengawetan meliputi kegiatan pelestarian produksi, pelestarian jenis dan perlindungan penunjang sistem kehidupan. Objek kegiatannya adalah hutan lindung, hutan pantai, dan daerah aliran sungai, sedangkan bentuk kegiatan pengawetan keanekaragaman plasma nutfah terbagi menjadi dua, yaitu konservasi *ex-situ* dan konservasi *in-situ*.

³ Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) Hlm. 89.

⁴ NN, Undang-undang kehutanan dan ilegal logging, Bandung, fokus media, 2014, h 226

Konservasi *in-situ* adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestifikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang. Jenis kegiatan konservasi *in-situ* adalah kebun binatang, taman safari, kebun botani dan museum. Konservasi *ex-situ* merupakan metode konservasi yang mengkonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi tertuanya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkan atau bagiannya di bawah perlindungan manusia. Jenis kegiatan konservasi *ex-situ* adalah Cagar Alam Dan Suaka Margasatwa.

Menurut Undang-Undang tentang pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 23 Tahun 1997, konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkat dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Kegiatan konservasi meliputi tiga hal yaitu :

- a. Melindungi keanekaragaman hayati (*biological diversity*)
- b. Mempelajari fungsi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
- c. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan umat manusia.⁵

⁵ Agus Mulyana, Dkk, *Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/blok di kawasan konservasi, jakarta, kementrian lingkungan dan kehutanan*, 2019, h 19

3. Hukum Kehutanan di Indonesia

Indonesia sebagai Negara hukum membagi hukum kepada dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat/ hukum sipil. Menurut Ulpianus hukum publik merupakan hukum yang berhubungan dengan Negara Romawi. Sedangkan hukum sipil merupakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan seorang. L. j. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding Tot The Studie Van Het Nederlandsche Recht*" sependapat dengan pendapat tersebut namun tentang hukum sipil ditegaskan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan orang-orang (*bijzondere belangen*) dan pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang berkepentingan itu.

Sedangkan hukum publik merupakan peraturan-peraturan Hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) karena itu pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Seiring perkembangan zaman Hukum di Indonesia perlu diadakan pengembangan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan. Tiga alasan yang menjadi aspek pengembangan ini, yaitu : *Pertama*, pengelolaan lingkungan hidup dan yang berkaitan dengannya harus diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Sehingga penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, landasan hukum dan prosedur peraturan perundangan lingkungan diperlukan pengembangan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-

pihak yang terkait guna mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan. *Ketiga*, pengembangan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah terkait. Aspek ini sangat penting terutama dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam mengatur kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti industri, pertambangan, pertanian dan kehutanan.⁶

Hukum kehutanan sendiri merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Dalam hukum Inggris Kuno yang disebut dengan Forrest Law (Hukum Kehutanan) adalah : “*The system or body of old law relating to the royal forrest*”. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, menyatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah : “*Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan*”. Dengan demikian ada tiga unsur yang diatur dalam hukum kehutanan yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) Hlm. 115-116.

- c. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁷

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan merupakan kumpulan kaidah/ ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan yang mengatur antara hubungan individu dengan hutan dan kehutanan. Berikut merupakan beberapa aturan-aturan tentang hukum perlindungan hutan di Indonesia yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- d. Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- e. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- f. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- g. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- h. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004

⁷ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan...*, Hlm. 5-6

- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan-peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar usaha-usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perlindungan hutan berasaskan kepada :

- a. Keadilan dan kepastian hukum
- b. Keberlanjutan
- c. Tanggung jawab Negara
- d. Partisipasi masyarakat
- e. Prioritas, dan Keterpaduan dan koordinasi.⁸

Penurunan kualitas lingkungan yang semakin meningkat menyebabkan tumbuhnya lembaga nonpemerintah (*Non-Governmental Organization/ NGO*) dan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

juga beberapa sektor pemerintahan tersadarkan akan pentingnya memberikan pendekatan baru mengenai masalah-masalah lingkungan. Pendekatan secara konvensional dalam penyadaran sesungguhnya dianggap tidak memadai, maka harus dilakukan pendekatan yang lebih “lunak” yaitu penyelesaian persoalan lingkungan dengan keyakinan dan agama. Pembangunan yang dilakukan menyebabkan tekanan dan kerusakan pada sumber daya alam Indonesia. Masyarakat telah menyadari ini sejak tahun 1970, ketika Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendirikan jaringan untuk membela lingkungan, memfasilitasi dan membangun kapasitas LSM lingkungan di Indonesia tumbuh sangat cepat hingga tahun 2014 telah ada 6000 LSM, dan 400 jaringan di antaranya termasuk dalam jaringan WALHI. Banyak LSM yang telah melakukan pendekatan untuk penyadaran lingkungan melalui aspek yang berbeda, misalnya, melalui sains dan penelitian, pendidikan, advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. LSM ini menggunakan pendekatan konvensional dan sekuler yang terkadang tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dipakailah agama sebagai suatu pendekatan, di mana masyarakat Indonesia sangat meyakini agama.⁹

⁹ Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah...*, Hlm. 88.

4. Peran Polisi Kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan dalam Pasal 47 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan, hutan kawasan hutan, dan hasil hutan yang di sebab kan oleh perbutan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama, serta penyakit, dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak dan Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

PASAL 48

1. Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun diluar kawasan hutan.
2. Perlindungan huutan pada hutan Negara dilaksanakan oleh pemerintah
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 22 dan pasal 29, serta pihak-pihak yang menrima wewenang pengelolaan hutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
4. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya

5. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan.
 6. Ketentuan lebih lanjut sebagai mana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁰
- a. Tugas Polisi Kehutanan.

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya kerusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. (Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor. 17 tahun 2011).

Adapun tugas polisi kehutanan menurut Alam Setia Zain, adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan.

¹⁰ N.N, Undang-Undang Kehutanan Dan Ilegal Logging, Bandung, Fokus Media, 2011, H130

b. Fungsi Polisi Kehutanan

Untuk melindungi hutan dari praktek-praktek pencurian dan penjarahan liar, polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga keutuhan batas kawasan hutan
- 2) Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah
- 3) Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah
- 4) Melarang penebangan tanpa izin
- 5) Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin
- 6) Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah
- 7) Melarang pengangkutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang disebabkan untuk itu
- 8) Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama dan penyakit

- 9) Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah pohon di kawasan hutan tersebut
- 10) Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan.
- 11) Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air¹¹

5. Sanksi Pidana Terhadap Pengerusakan Hutan

Pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara ini telah ditetapkan dan diatur secara rinci di dalam KUHP maupun KUHAP.¹² Dalam pasal 10 KUHP Indonesia BAB II tentang Hukuman-hukuman merumuskan bahwa hukuman di Indonesia terdiri dari :

- a. Hukuman-hukuman pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda).

¹¹ Khakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm 165

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I..*, Hlm. 24.

- b. Hukuman-hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim).¹³

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah

Bentuk tindakan penebangan di dalam kawasan hutan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya di dalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan lebih dari 200 meter kubik, kelebihan kayu tebangan itu merupakan tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politeia, 1986) Hlm. 34.

- b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hukum dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Misalnya, izin penebangan diberikan sebanyak 100 M di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu, namun dilakukan tidak di dalam lokasi yang di maksud.

Bentuk-bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan di atas tadi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi yang diikuti dengan niat dan tindakan pelaku secara nyata.¹⁴ Untuk mencegah kerusakan hutan maka dirumuskan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yaitu :

Pasal 82 :

- a. Orang perorangan dengan sengaja :
- 1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a
 - 2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

¹⁴ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana...*, Hlm.46

- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) dan (2) ini menjelaskan tentang pidana terhadap para pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan tanpa izin pihak berwenang di dalam kawasan hutan lindung maka akan diberikan sanksi penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 5 tahun. Dengan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.

Pasal 83 :

- a. Orang perseorangan dengan sengaja :
- 1) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d;
 - 2) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - 2) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 83 ayat (1), memberikan penegasan terhadap para pelaku yang tidak ikut menebang namun dengan sengaja turut membantu dalam melakukan pengrusakan hutan seperti memuat, membongkar dan menguasai kayu tanpa izin pihak berwenang maka akan dikenakan sanksi paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah terhadap mereka yang bertempat tinggal di kawasan hutan. bagi pelaku yang melakukan tindakan terlarang ini dengan sebab kelalaian maka akan diberikan pidana penjara paling sedikit 8 bulan dan paling lama 3 tahun dengan pidana dengan paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bagi pelaku yang bertempat tinggal di luar kawasan hutan melakukan perbuatan yang dimaksud pada pasal 83 baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya maka akan diberikan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun dengan dengan paling sedikit 500 ribu rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah.

Pasal 84 :

- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada pasal 84 ini memberikan penjelasan tentang pidana terhadap para pelaku yang membawa alat-alat yang dipergunakan untuk memotong pohon di kawasan hutan terlarang, mereka tidak memotong namun hanya membawa alat saja. Jika perbuatan ini dilakukan dengan sengaja oleh orang yang tidak bertempat tinggal di dalam kawasan hutan maka akan dikenakan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling sedikit 500 miliar rupiah. Bagi yang melakukan perbuatan ini disebabkan karena kelalaiannya maka akan diberikan pidana penjara paling sedikit 8 bulan dan

paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 85 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁵

Dari pasal-pasal mengenai ketentuan pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka menurut penulis bentuk-bentuk pidana di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. ringan

Menurut penulis pidana yang dapat digolongkan pidana ringan yaitu pidana yang dijatuhkan kepada orang/perorangan yang bertempat tinggal di kawasan hutan dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan aktivitas perusakan hutan sesuai dengan yang rumuskan dalam pasal-pasal di atas maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 bulan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit

¹⁵ http://Www.Dpr.Go.Id/Dokjadjih/Document/Uu/UU_2013_18.Pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Sedang

Pidana yang tergolong sedang ini diberikan kepada : Orang/ perorangan yang tidak bertempat tinggal di kawasan hutan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal di atas maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 8 bulan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Orang/perorangan yang tidak bertempat tinggal di kawasan hutan dengan sengaja melakukan perusakan hutan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang no 18 tahun 2013 maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Berat

Pidana berat ini dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan pengangkutan kayu dan membawa alat-alat berat dalam kawasan hutan tanpa izin maka akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut penulis pidana yang berikan ini setimpal dikarenakan pejabat yang 29 seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat malah melakukan perusakan hutan sehingga hukumannya harus dua kali lipat dari pidana masyarakat biasa.¹⁶

6. Tangung jawab Negara dalam perlindungan hutan dan konservasi Alam

Kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup diplopori oleh perserikatan bangsa-bangsa yang membentuk komisi dunia untuk liingkungan dan pembangunan (*worl commission on environment development / wcde*). Pembentukan WCED dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mewujudkan aspek-aspek hokum yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasarkan konverensi *stock holm* pada 1972. komisi ini mengumumkan laporannya yang berjudul *our commom future* dalam laporannya WCED memberikan penyusunan strategi konservasi baru yang disebut *Caring For The Earth : A Stategy For Suistaninnable Devloment*) berdasarakan pada laporan tersebut menyatalan bahwa salah satu sebab kerusakan lingkungan adalah tata ekonomi dunia yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Hlm. 1-2

Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu konverensi tingkat tinggi tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan nama *United Nations Conference On Environment And Development Di Ridejanairo, Brazil 1992*. Konferensi ini menghasilkan berbagai consensus mengenai berbagai bidang yang sangat penting yang tercantum dalam berbagai dokumen dan perjanjian antara lain sebagai berikut :

- a. TheRio Janeiro Declaration on Environment and Development
- b. Agenda 21 (Earth's Action Plan)
- c. The Framework Convention on Climate Change
- d. The Convention on Biological Diversity
- e. Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the management, Conservation and Suistanable Development of all Types of Forest (Forestry Principle)

Penekanan prinsip tanggung jawab Negara dalam deklarasi stock holm dirumuskan sebagai kewajiban untuk perlindungan lingkungan , yaitu : Tidak hanya lingkungan hidup di wilayah nasional tapi di lingkungan hidup di secara global sebagaimana yang tercantum dalam prinsip ke 21 dalam deklarasi ini *“the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of statis or areas beyond the limitis of national jurisdiction”* prinsip tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kerusakan

atau pencemaran lingkungan didalam wilayah dan bersifat lintas batas Negara. Berney menyatakan, prinsip tanggung jawab Negara di maksudkan kewajiban untuk mengendalikan sumber kerusakan dengan cara pencegahan yang tidak menimbulkan kerusakan karena setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing – masing. Demikian juga halnya prinsip kehutanan *Forestry Principel* yang lahir dari konsesus internasional yang berlaku untuk semua jenis tipe hutan dengan tujuan untuk memberi kontribusi pada pengelolaan konservasi dan pembangunan hutan berkelanjutan serta untuk menjamin fungsi dan pemanfaatannya yang beragam dan saling melengkapi. Prinsip tanggung jawab Negara dalam *Foresty Principel* diarahkan antara lain:

- a. Penetapan standar internasional melalui pembentukan perjanjian internasional termasuk pembentukan sistem kelembagaan dan mekanisme penerapannya
- b. Penerapan standar Internasional melalui kebijakan nasional, atau ketentuan nasional setiap Negara dengan maksud untuk perlindungan keberlanjutan fungsi hutan secara otonomis, ekologis, sosial, dan budaya.

Salah satu organisasi internasional yang menyepakati mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan adalah *International Tropical Timber Organization (ITTO)* atas kesepakatannya ITTO menerbitkan ketentuan antara lain :

- a. Panduan pengelolaan hutan secara lestari
- b. Kriteria pengukuran dalam pengelolaan hutan secara lestari
- c. Panduan membangun dan pengelolaan hutan secara lestari
- d. Panduan kriteria zat indikator bagi pengelolaan hutan alam tropis
- e. Panduan konservasi keragaman biologi pada hutan produksi tropis
- f. Panduan pengelolaan kebakaran hutan di hutan tropis

Berbagai panduan diatas dijadikan standar standar tindakan atau kewajiban yang mengikat secara moral bagi Negara- Negara di dunia. Berbagai koferensi internasional tersebut berimplikasi pada Negara-Negara yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia secara nasional perlindungan dan pengelolaan hutan dimulai sejak tahun 1990 dengan penetapan program kawasan hutan dan alam melalui hak pengusahaan hutan hph dan *Tebang Pilih Taman Industry (TPTI)* bahkan berbagai produk perundang undangan telah diundangkan sebagai payung hukum perlindungan dan pengelolan hutan di indonesia sedikitnya 4 kali undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan hutan dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang paling terbaru dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai komitmen pemerintah dalam melindungi hutan dari kerusakan.

Permasalahan mengenai pengelolaan hutan telah menjadi perhatian dunia internasional terutama kaitannya dengan fungsi lingkungan hidup secara global.

Indonesia sebagai peserta dalam berbagai forum internasional yang membahas tentang lingkungan hidup telah menerima kesepakatan. Diantaranya agenda 21 global dari konferensi perserikatan bangsa-bangsa, *Prostry Principel* dan berbagai kesepakatan organisasi internasional lainnya, oleh karenanya Indonesia menjadi Negara yang menjalankan prinsip keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan sebagai upaya melanjutkan pembanguna yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan dan mengadopsi berbagai prinsip dari perjanjian internasional.¹⁷

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harafiah, konservasi berasal dari bahasa inggris *conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. Adapun menurut Ilmu Biologi, konservasi adalah : Efisiensi penggunaan, produksi, transmisi, atau distribusi energi yang berakibat pada turunnya konsumsi energi dengan tetap menghasilkan manfaat yang sama ; Pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana ; Pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman

¹⁷ Fikri, Jurnal Ilmu Hukum Penerapan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kawasan Leuser, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Banda Aceh, 2012, HI 293-298

genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya.¹⁸

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 angka 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)¹⁹

Konservasi Alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang beberapa *sepesies* binatang dan tumbuh telah punah secara alamiah (misalnya dinasaurus). Namun dewasa ini kegiatan manusia dan pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan bahaya kerusakan alam, sehingga beberapa species jumlahnya berkurang secara drastis bahkan spesies tertentu telah punah sekarang.²⁰

¹⁸ Ibid h 90

¹⁹ [Http://Www.Biology-Online.Org/Dictionary/Conservation](http://Www.Biology-Online.Org/Dictionary/Conservation), Diakses Pada 8 February 2020, Jam 15.55

²⁰ Setia Zain Alam, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 1997, Hl 30

Pengelolaan Kawasan Konservasi sebanyak 521 unit dengan luas 27.108.486,54 hektar. Selain kemampuan pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun diluar kawasan hutan atau habitat alaminya. Hingga saat ini, tercatat 47.910 spesies keanekaragaman hayati di Indonesia (LIPI 2013). Jumlah dalam catatan tersebut, masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada.

KSDA juga bertanggung jawab atas pengelolaan pemanfaatan wisata alam pada kawasan konservasi. Nilai jasa ekosistem tersebut antara lain juga berupa potensi pemanfaatan sumber daya air dari kawasan konservasi (\pm 600 Milyar 3) pemanfaatan panas bumi (6,16 GW potensi listrik dari geothermal) serta perdagangan simpanan karbon (\pm 625 giga ton). Tiga sasaran konservasi, yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.,
- b. Pengawetan sumber-sumber plasma nutfah., serta
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah yang mempunyai program dalam upaya pelestarian alam, sebagai salah satu program seperti cagar alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa dan ekosistem, yang perkembangannya dan digunakan untuk membudayakan flora dan fauna yang punah, ini merupakan salah satu upaya program pemerintah, selain itu Indonesia kaya akan pelestarian alam yang bisa di manfaatkan untuk

melestarikan dan bermanfaat sebagai tempat objek wisata, sebagai ilmu pengetahuan dan budaya, Indonesia harus di pertahakan.²¹

7. Manfaat perlindungan hutan

Sumber daya alam merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia yang tak dapat dinilai harganya. Oleh karenan yaitu, sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana, terbuka serta adil lagar dimanfaatkan secara berdaya guna, tepat guna sehingga berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,

Urgensitas pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yakni pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya lebih lanjut diatur dalam PP No 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Danau atau Perusakan Laut, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Saifullah, Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, UIN Malang Pres, Malang, 2007. Hal 26

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam ada beberapa prinsip yang selama ini tersedia seperti:

- a. prinsip optimal, UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 3 menerangkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Apabila asas pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan maka akan terjadi kelangkaan SDA khususnya SDA minyak bumi. Penggunaan energi seoptimal mungkin untuk kebutuhan negara;
- b. prinsip lestari, merupakan upaya dalam mengelola SDA beserta ekosistemnya yang tujuannya untuk mempertahankan sifat serta bentuknya. Prinsip lestari pada pengelolaan SDA merupakan upaya yang dilaksanakan guna mengupayakan penjagaan terhadap SDA yang ada tetap ada, dilihat dari sifat ataupun bentuknya. PBB mengadakan konferensi pada tahun 1972, mengenai “*The Human Environment*” di *Stcholm* membawa negara industri serta melalui perkembangan bersama-sama untuk menggambarkan hak asasi manusia dan keluarganya guna lingkungan yang sehat dan produksi;
- c. prinsip mekanisme pasar, merupakan kecenderungan dalam pasar bebas dalam hal terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Teori ekonomi

standar mengemukakan bahwa walaupun pengaruh kelembagaan selain free market dapat juga memberikan hasil alokasi yang efisien serta maksimal. Dengan kata lain, apabila pasar tidak eksis, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan optimal.

Dari segi hukum dan kebijakan, kerusakan sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup. Secara konkrit, paradigma ini dapat dilihat dari instrumen hukum (*legal instrument*) yang digunakan pemerintah untuk mengatur penguasaan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Jika dicermati secara kritis, maka ditemukan fakta hukum bahwa substansi dari produk hukum negara (*state law*) dalam bentuk perundang-undangan mengenai pengelolaan SDA yang cenderung bernuansa sentralistik, bersifat sektoral, bercorak represif dan mengedepankan pendekatan sekuriti (*security approach*) (Nurjaya, 2006: 46-67). Dalam praktik sehari-hari pengelolaan sumber daya alam sering kali diasumsikan tidak berdasarkan pada fungsi konservasi serta fungsi produktifitas secara sempurna. Dari konteks produktivitas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah diatur bahwa sumber daya alam harus berdasarkan prinsip “dikuasi oleh negara” dan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, jika pengurusan sumber daya alam malah melemahkan prinsip “dikuasi oleh negara” dan prinsip

“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut maka hal itu dapat dikatakan inkonstitusional. Secara praktik, Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan judicial review pada beberapa undang-undang bidang sumber daya alam yang dianggap tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 melakukan penafsiran atas frasa “dikuasai oleh negara” sebagai alat pengujian dalam menguji suatu undang-undang bidang sumber daya alam. Undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan Gas Bumi yakni cabang produksi yang penting teruntuk negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, disamping itu merupakan kekayaan alam terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang mesti dikuasai oleh negara kemudian dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti isi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, khususnya mengenai frasa “dikuasai oleh negara”. Frase “dikuasai negara” tersebut menjadi frasa terpenting dalam keadaan suburnya liberalisasi ekonomi saat ini. liberalisasi ekonomi dewasa ini berakibat pada munculnya liberalisasi sumber daya alam tertutup melalui peraturan perundangundangan yang berjiwa liberal pula. Kepungan neoliberalisme pada pengusahaan sumber daya alam bisa pula termanifestasi dalam undang-undang. Kepungan liberalisasi pengusahaan sumber daya alam dapat mengancam sehingga hal ini sangat dikhawatirkan jika pengusahaan sumber daya alam yang menjadi

komoditas ekonomi itu tidak sejalan dengan amanat UUD NRI 1945, yaitu Pasal 33 yang menjadi pijakan supaya sumber daya alam tetap dikuasai negara sekaligus memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan dari hal tersebut diatas, menelisik konsepsi pengelolaan sumber daya alam adalah mencoba merekonstruksi arus pemikiran utama dalam paradigma pengelolaan atas sumber daya alam yakni yang selama ini kecenderungan negara terhadap eksploitasi, minimnya perbaikan dan pelestarian. Terbukti bahwa negara dalam banyak kasus mengeksploitasi di sektor-sektor tertentu (demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, sehingga pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis serta berlanjutnya fungsi sumber daya alam, ekologi).

Manfaat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada, kita dapat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat pelestarian dan perlindungan alam di antaranya sebagai berikut:

- a. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan seperti terjaminnya kesediaan air dan oksigen bebas di udara.
- b. Mempertahankan keanekaan genetis makhluk hidup.

- c. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan sehingga nilai pendidikan, ekonomi, dan reaksi alam dapat selalu terjaga.²²

Manfaat-manfaat perlindungan hutan ini tidak akan berhasil dicapai tanpa melindungi hutan, sehingga dalam menanggulangi kerusakan alam yang terjadi dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Berikut merupakan langkah-langkah pemerintah dalam melindungi hutan :

- a. Membuat aturan tentang lingkungan. Dalam kehutanan misalnya, pemerintah membuat aturan-aturan tentang pengelolaan alam. Aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah ternyata menimbulkan persoalan baru, yaitu rakyat merasa hidupnya terganggu dan terbelenggu. Terutama mereka yang menggantungkan hidupnya di hutan. Mereka merasa adanya ketidak-adilan. Hutan yang mereka jaga justru dikuasai oleh para pengusaha yang dengan seenaknya mengambil hasil hutan untuk kepentingan pribadinya.
- b. Pemerintah harus lebih selektif untuk menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan. Jangan sampai izin diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hasil tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jika ada pihak wewenang yang diberi izin melakukan pelanggaran maka pemerintah berhak mencabut izin usahanya.

²² Kadaryanto, Dkk., Biologi 1 (*Mengungkapkan Rahasia Alam Kehidupan*), SMP Kelas VII, (Jakarta: Yudistira, 2006) Hlm. 194.

- c. Pemerintah juga berhak memberikan sanksi pidana kepada pencuri kayu dari kawasan hutan lindung yang telah mengeksploitasi hutan demi kepentingan pribadinya. Sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- d. Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 - 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut. Mengikut sertakan masyarakat terutama dalam peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.
- e. Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, POLRI yang dibantu oleh POLHUT dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada hutan

lindung serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap para cukong - cukong kayu yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya

- f. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan dengan maksimal agar kelestarian hutan dapat dipertahankan. Namun hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya peran semua elemen baik ditingkat Pemerintahan sampai masyarakat harus bekerja sama dan berperan aktif dalam memberantas pngrusakan hutan ini. Karena kelestarian alam tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudaharat), cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan.²³

²³ Ahsin Sakho Muhammad Dkk (Ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*..., Hlm.78-80

B. Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan²⁴. Hutan secara singkat dan sederhana didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang didominasi oleh pohon. Dalam buku *The Dictionary of forestry* yang diedit oleh John A. Helms (1998:70) dalam Didik (2000), forest (hutan) diberi pengertian sebagai berikut: *“An ecosystem characterized by a more or less dense and extensive tree cover, often consisting of stands varying in characteristics such as species composition, structure, age class and associated processes, and commonly including meadows, streams, fish, and wildlife.*

Suatu ekosistem dapat dilihat oleh penutupan pohon yang kurang lebih padat dan tersebar, seringkali terdiri dari tegakan-tegakan yang beragam ciri-cirinya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang terkait, dan umumnya mencakup padang rumput, sungai-sungai kecil, ikan, dan satwa liar. Definisi tersebut menekankan komponen pohon yang dominan terhadap komponen lainnya dari ekosistem itu, dan mensyaratkan adanya kondisi iklim dan ekologi yang berbeda dengan kondisi luarnya. Penekanan hutan sebagai suatu

²⁴ N.N, Undang-Undang Kehutanan Dan Illegal Logging, Bandung, 2011, H 13

ekosistem mengandung maksud bahwa di dalam hutan terjadi hubungan saling tergantung satu komponen dengan komponen lainnya yang terjalin sebagai suatu sistem. Satu komponen dari sistem itu rusak (atau tidak berfungsi) menyebabkan komponen lain terganggu dan akibatnya sistem itu tidak dapat berjalan normal, hutan itu sendiri sebagian komponen dari ekosistem yang lebih besar, sehingga apabila hutan rusak akan mengganggu sistem yang lebih besar itu. menyatakan bahwa hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk suatu iklim mikro dan kondisi ekologi spesifik.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan

kepentingan nasional, Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka satu peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam melakukan praktik-praktik pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan

masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.²⁵

2. Dasar Hukum Islam

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Pencipta. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT telah terhimpun dalam Al-qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah SWT, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.²⁶ sebagaimana teruang dalam Surat Al-Baqarah: 2:164)

²⁵ Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan Dan Illegal Logging,(Bandung, Nuansa Aulia, 2008). Hlm. 195-196.

²⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, HI 1-2

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي
 الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar dilautan mengangkut segala apa yang memberi manfaat kepada manusia, air (hujan) yang diturunkan Tuhan dari langit, lalu dihidupkan bumi sesudah mati (tandus) dan berkeluaran berbagai jenis hewan dan perkisaran angin dan awan yang diperintah bekerja diantara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berakal”.*²⁷

²⁷ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Al-Baqarah: [2] : Ayat 164 hlm 26

Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan dimuka bumi). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*²⁸

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba Nya untuk memperbaikinya.

Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.²⁹ Sebagaimana pendapat *Al-Qurthubi* yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Maksudnya, Allah melarang manusia merusak kelestarian alam, baik sedikit ataupun banyak. *Al*

²⁸ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Al-A'raf ayat [07] Ayat 56 hlm 158

²⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Hlm.144.

Qurthubi juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya mudharat.³⁰ Tindakan merusak lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Para ulama di MUI berpendapat bahwa amal makruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan dalam segala bidang, termasuk upaya memberantas praktik *illegal logging* adalah merupakan amal makruf nahi munkar.³¹

Dalam Hukum Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama adanya *Nash Al-Qur'an* yang melarang dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup. Ketiga, pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya. Jadi perbuatan pengrusakan

³⁰ Ahsin Sakho Muhammad Dkk (Ed), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*..., Hlm. 84

³¹ H.M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*..., Hlm.182.

lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur pidana di atas.³²

Tindakan pengrusakan dan pelanggaran (Fasad) yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya ketiadaan keseimbangan tersebut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan semakin besar pula dampak buruknya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia. Karena Allah SWT menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.³³

³² Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang) Hlm. 8.

³³ Ahsin Sakho Muhammad Dkk (Ed), Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) ..., Hlm. 79

Sebagaimana Firmah Allah SWT dalam Surat Asy-Syuura [42] ayat 30.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagai besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”³⁴

Untuk mencegah perusakan hutan yang terus saja terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia maka Islam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjaunnya :

- a. Jarimah Hudud
- b. Hukuman qishash dan diyat
- c. Hukuman kifarati
- d. Hukuman Ta'zir.³⁵

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan had nya. Sehingga tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam katagori tindak pidana (*Jarimah*) *takzir*, karena perbuatan perusakan lingkungan

³⁴ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Asy-Syuura [42] ayat 30 hlm 487

³⁵ Wahab Afif, Hukum Pidana Islam, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967) Hlm. 214.

ini dilarang oleh syara' akan tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*).

Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah sebagai pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat tahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.³⁶

3. Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan hutan

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya.

³⁶ Ahmad. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) Hlm. 191.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا

Artinya:

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.³⁷

Tanggung jawab seorang pemimpin mencakup segala lini kehidupan. Pemimpin berwenang dalam mengelola suatu negara dari hal yang besar hingga yang terkecil, di darat maupun yang di laut termasuk tumbuhan, hewan, air, hutan, maupun segala sesuatu yang ada didalamnya. Semua itu semata-mata dengan tujuan masalah atau kepentingan bersama umat manusia karena seorang pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya didunia maupun di akhirat kelak.³⁸ seorang pemimpin bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan untuk keberlangsungan hutan tersebut karena seperti kita ketahui hutan merupakan paru-paru dunia, dalam islam pengelolaan hutan dikenal dengan istilah *Al-hima'* (kawasan hutan lindung dan terlarang) dahulu di kalangan masyarakat arab jika ada seseorang pemimpin menemukan suatu lahan yang subur, maka menjadikan

³⁷ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS surat Al-Isra [17] ayat 36 hlm 286

³⁸ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

lahan hutan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang untuk memanfaatkan anjing di daratan tinggi dan menyuruhnya menggonggong, maka batasan tanah ,mereka sejauh sampainya suara gonggongan anjing itu sampai. Namun ini merupakan praktek yang dilarang menurut syara' Rasulullah SAW melarang praktek-praktek seperti itu karena mempersempit hak orang lain dan membatasi mereka memanfaatkan sesuatu yang terdapat hak mereka didalamnya

Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*al muhabat*) dengan status bumi (*Al-mawat*) dalam hutan-hutan liar. Serta berstatus bumi pinggirian (*marafiq Al-badad*) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garap pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negative pada lingkungan sekitar.

Untuk melindungi hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat lading pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi (*Hima Al-Mawāt*). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya.
- b. Larangan mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada

ukuranya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi.

- c. Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan , walau telah mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia yang bisa menyebabkan pencemaran udara dan air. Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi).³⁹

4. Prinsip- Prinsip Fiqh Siyasah Dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. Pengertian fiqh syasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.⁴⁰ *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al Qur“an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”⁴¹

³⁹ Ibid Hlm. 144.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), H. 2.

⁴¹ *Ibid*, H. 3.

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "*faqih*" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.⁴²

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴³

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁴⁴

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah

⁴² Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), H. 9.

⁴³ *Ibid*, H. 10.

⁴⁴ *Ibid*, H. 3.

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴⁵

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama : hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁴⁶ Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as- Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.⁴⁷

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,⁴⁸ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

⁴⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), H. 49.

⁴⁶ *Ibid*, H. 50.

⁴⁷ *Ibid*, H. 51.

⁴⁸ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), H. 17.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁴⁹ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan intern tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.⁵⁰
- c. Adapula istilah *as-siyasah as-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam

⁴⁹ *Ibid*, H. 49

⁵⁰ *Ibid*, H. 50

mengenai *as-siyasah syar'iyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali⁵¹ mengatakan, “*as-siyasah as-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu”.

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *as-siyasah as-syar'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah *maslahat* yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, “ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syariat Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang

⁵¹ Beliau Adalah Ali Bin 'Aqil Bin Muhammad Abu Al-Wafa' Al-Zhihari, Salah Seorang Tokoh Terkenal Satu-Satunya Di Jamannya, Alim, Penukil Dan Cerdas. Menulis Kitab Yang Sangat Masyhur, “*AL Funun*” Lebih Dari 400 Jilid. Sayangnya Beliau Menyelisihi Manhaj Salaf Dan Sejalan Dengan Manhaj Mu'tazilah Dalam Banyak Hal. Namun Setelah Itu Beliau Mengumumkan Taubatnya Dari Manhaj Mu'tazilah Serta Menulis Buku Yang Membantah Mereka. Dalam Rapung Samuddin, 50.

mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.⁵²

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu :

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al- amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.⁵³

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), H. 4.

⁵³ *Ibid*, H. 6.

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*)⁵⁴

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, H. 7.

⁵⁵ Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah", Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, H. 298. Yang Mengutip Dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), Hlm. 57

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.⁵⁶ Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-nisa ayat:58)."*⁵⁷

⁵⁶ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. 1, H. 297-298

⁵⁷ Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan Dan Penterjemah Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, H. 113.

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.⁵⁸

2. Ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi 8 (delapan):

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-undang)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah tanfiedziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan).⁵⁹

Hutan merupakan Hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

⁵⁸ Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autentisitas Ideologi Dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), Cet. 2, H. 3

⁵⁹ *Ibid*, h. 43.

dipisahkan⁶⁰. Hutan secara singkat dan sederhana didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang didominasi oleh pohon. Peran polisi dalam melindungi hutan sangatlah penting hal tersebut merupakan salah satu cara untuk melestarikan hutan lindung agar tetap asri nyaman dan terjaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut polisi hutan dibantu oleh masyarakat yang ikut serta, serta aktif ikut melestarikan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bab V bagian kelima dimana mengatur tentang Polisi Kehutanan dan masyarakat diwajibkan untuk melestarikan hutan, menjaga hutan, dan tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak hutan, tidak boleh mengambil satwa hutan, serta tidak boleh mengambil kayu kecuali izin polisi kehutanan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Polisi kehutanan memiliki tugas dan kewajiban serta amanah untuk menjaga dan melindungi hutan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

⁶⁰ Undang-undang kehutanan dan illegal logging, bandung, 2011, h 13

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas menjelaskan amanah yang penting yang harus dijalankan polisi hutan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya polisi hutan harus amanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam menetapkan hukum harus tegas dan harus menetapkannya secara adil agar orang yang melakukan kerusakan hutan merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam menjaga hutan karena polisi kehutanan memiliki peranan yang penting dalam menjaga hutan, namun dalam prakteknya polisi kehutanan belum menjalankan tugasnya secara optimal karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja polisi kehutanan. Polisi kehutanan belum bisa menjalankan tugasnya secara amanah hal tersebut belum tercermin dari sifat Rasulullah SAW yang di karuniai 4 sifat salah satunya adalah Amanah. Amanah adalah dapat dipercaya dan menjalankan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi kehutanan, hal tersebut terlihat dari banyaknya hutan yang terjadi seperti ilegal logging, kebakaran, serangan hama penyakit, pemburuan liar. Dari sifat tersebut polisi hutan kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja dari aparturnya kurang maksimal.

Maka Urgensi pengelolaan sumber daya alam berdasar *fiqh al bi'ah* menjadi penting untuk di tawarkan. Prinsip pengelolaan sumber daya alam selama ini masih dirasakan belum menjawab pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan melindungi alam secara bijaksana. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu berdasar prinsip *Fiqh Al bi'ah*. *Fiqh al bi'ah* menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, *fiqh al bi'ah* menempatkan manusia adalah sebagai wakil Tuhan yang mana wajib bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolaannya. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk menunjang kehidupannya, sehingga manusia memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga kelestariannya. *Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah)* akan menjadi pandangan untuk kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Fiqh Al Bi'ah*, fiqh ini menjelaskan suatu aturan tentang perilaku ekologis masyarakat dengan mengacu pada teks *syar'i* yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab bahwasannya kehidupan dunia ini merupakan ladang serta akan di panen kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hakikatnya diri kita ini menjadi seorang pemimpin kemudian dimintai pertanggung jawaban nantinya atas kepemimpinannya itu. Oleh karena itu sebagai khalifah manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan atas kehancuran serta kepunahan

yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Hatim Ghozali dalam pandangannya yang merumuskan landasan teologis dalam *fiqh al-biah* ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, adalah : *Pertama*, rekonstruksi dari makna khalifah. Dalam kitab suci Al-Qur'an ditegaskan bahwa khalifah di muka bumi tidak untuk merusak dan menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Disamping itu untuk membangun kehidupan yang damai, adil, serta sejahtera. Dengan itu, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi secara sekejap mencoreng makna hakikat dari manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah 2: 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنٌۭ نُّسِیْجٌۭ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁶¹

Oleh karena itu, pemahaman manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi dapat melakukan apapun terhadap lingkungan disekitarnya sungguh tidak mempunyai sandaran teologisnya. Berkaca dari hal tersebut, semua bentuk eksploitasi serta perusakan terhadap alam dapat dikatakan adalah pelanggaran berat/suatu kejahatan.

Kedua, terkait ekologi sebagai doktrin ajaran yang berarti wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi merupakan doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti halnya dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam. Kelima tujuan dasar itu dapat terejawantahkan apabila lingkungan serta alam semesta mendukungnya.

Ketiga, belum sempurna iman seseorang jika tak peduli terhadap lingkungan. Iman seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ritual semata. Akan tetapi, juga menjaga serta pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits tersebut memperlihatkan bahwa kebersihan adalah salah satu unsur dari pemeriharaan lingkungan merupakan

⁶¹Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Al-Baqarah 2: 30 hlm 7

sebagian daripada iman. Selain itu, jika ditinjau dari segi qiyas aulawi, menjaga lingkungan, sungguh sangat terpuji di hadapan Tuhan.

Fiqh al biah dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Menurut bahasa "*fiqh*" *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang sifatnya praktis diambil pada dalil-dalil tafshili (terperinci). Kata "*al-bi'ah*" bisa berarti dengan lingkungan hidup. Mengenai Keunggulan dari Prinsip (*fiqh albi'ah*) mencoba mensinergikan antara manusia dengan alam dalam mengelola lingkungan yang penanganannya mendasarkan pada (keselamatan dan pelestariannya), meletakkan suatu dasar moral pendukung segala upaya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan sertapembinaan selama ini yang ternyata masih belum ampuh mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang ada serta masih terus berlangsung. Pertama; fiqih lingkungan (*fiqih al-biah*) dirumuskan para intelektual muslim yang mencerminkan gelombang dinamika fiqh terkait adanya perubahan konteks dan situasi..⁶²

Berdasarkan prinsip pengkajian Fiqih Lingkungan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang

⁶² Noor Fitrian, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Fiqh Al-Bi'ah*, Universitas Brawijaya, Vol 3 Nomor 1, Hl 47-55

terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).⁶³

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.⁶⁴

Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

⁶³ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), 163

⁶⁴ Ibid 167

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.⁶⁵

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebihan dalam segala hal.

4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.⁶⁶

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

⁶⁵ Ibid 170

⁶⁶ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), 17

Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqih lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.⁶⁷

Pandangan Islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia dituntut atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Siklus Hidrogen (Air)

Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di alam ini di mulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus *hydrological*. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan (evaporasi) dari permukaan laut lebih banyak dari pada presipitasi (jatuh sebagai air hujan atau salju). Air juga menguap dari tanah, danau, sungai, dan dari daun - daun tanaman

⁶⁷ Ibid 180-185

(transparansi), tetapi jumlah total penguapan yang terjadi kurang dari jumlah yang jatuh sebagai curah hujan. Hujan yang terjadi di daratan kemudian kembali ke laut melalui sungai, aliran permukaan pantai dan aliran air bawah tanah.⁶⁸

Siklus hidrologi mengalami ketidak normalan seperti daya tampung tanah terhadap resapan air tanpa tumbuhan menjadikan aliran air lebih banyak run off dipermukaan. Sumber air berkurang akan adanya siklus hidrologi terganggu, yaitu berkurangnya pepohonan yang mempunyai ciri struktur percabangan yang mengalirkan air hingga batang dan akar, selanjutnya berkurangnya kanopi sehingga evaporasi tanah lebih besar; dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Jenis pepohonan masing – masing mempunyai ciri khusus untuk mengalirkan air hujan seperti apakah percabangan mengarah ke atas atau ke bawah.

b. Menjaga Kestabilan Atmosfer

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٤﴾

Artinya :

*Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.*⁶⁹ Q.S Ad-Dukhan [44] Ayat 10

Berulang kali Al - Qur'an mengingatkan akan pentingnya langit. Tidak kurang dari 300 kali kata langit diulang dalam Al – Qur'an dalam berbagai surat

⁶⁸ Utami, Konservasi Sumber..., 165-166.

⁶⁹ Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Ad-Dukhan [44] Ayat 10 hlm 497

dan ayat. Langit merupakan komponen penting yang menjaga hidup dan kehidupan tetap berlangsung. Di dalamnya ada angin, awan dan hujan yang dengan kehidupan akan berlangsung terus menerus.⁷⁰

c. Menanam Pohon dan Menjaga Kesuburan Alam

Penanaman pohon disuatu kawasan atau lahan, akan memberi manfaat besar bagi alam. Seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain (*organisme*).

Berbagai permasalahan tentang pemanasan global sebenarnya bisa diatasi sejak dini. Menurut Endang Dwi Siswani, solusi untuk mengurangi emisi gas buang dan penyerapan adalah penyerapan gas berbobot 44 gram/molekul itu.⁷¹

d. Melindungi Kawasan Perlindungan Lingkungan Kehidupan.

Berdasarkan Undang-undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, terdiri dari :

⁷⁰ Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Dukhaan ayat 10-11 yang artinya: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah adzab yang pedih

⁷¹ Siswani, "Sabuk Hijau...", 56

- a. Kawasan hutan suaka alam.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam.
- c. Taman buru.⁷²

C. Tinjauan Pustaka

ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, makalah jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul “peran polisi kehutanan dalam menaggulangi tindak pidana illegal logging dikawasan hutan provinsi lampung” yang disusun oleh Helena Vewawati Manalu Fakultas Hukum jurusan hukum pidana Universitas Lampung. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa peran polisi kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keamanan dibidang kehutanan. Hasil hutan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang memetik manfaat dari hasil hutan akan tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hokum atau dengan cara kejahatan tindak pidana illegal logging diatur peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan undang-undang nomor 18

⁷² Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Juz 8, (Mauqi’u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005)*, 145

tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang peran polisi kehutanan dan Undang-Undang yang di gunakan juga sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penulis berfokus pada perbandingan peran polisi kehutanan dalam hukum positif dan hukum islam.⁷³

2. Skripsi yang berjudul “penegakan hukum yang terhadap perlindungan hutan oleh polisi kehutanan di KPH purwodadi kabupaten grobogan” yang disusun oleh Dani Fittria Ulfah fakultas ilmu social jurusan hukum dan kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan kawasan hutan yang terjadi di KPH purwodadi akibat penebangan dan pencurian hasil hutan secara liar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Perum Perhutani KPH Purwodadi, sehingga perlu penanganan yang sangat cepat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berfokus pada perbandingan antara hukum positif dengan hukum islam. Sedangkan penelitian ini terfokus kepada kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi

⁷³ Helena Verawati Manalu, *Peran Polisi Kehutanan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan Provinsi Lampung*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahun 2016.

kehutanan dalam melindungi hutan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencurian hasil hutan.⁷⁴

3. Skripsi ini berjudul “ Analisis kinerja polisi kehutanan dalam perlindungan hutan di kabupaten sinjai “ yang disusun oleh Nurfatihah Amira Wi fakultas kehutanan kehutanan Universitas Hasanuddin Makasar. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di kawasan Kehutanan Kabupaten Sinjai akibat terjadinya penebangan liar yang merujuk kepada perambahan, pengalihan lahan menjadi kebun dan pohon yang ditebang untuk keperluan sehari-hari. Dikarenakan tidak adanya teguran yang tegas dari petugas. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan perbedaan penelitian ini dengan penulis berfokus pada perbandingan hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini terfokus kepada pentingnya peran polisi kehutanan dalam perlindungan hutan sangat erat kaitannya dengan kinerja dan kualitas seorang polisi kehutanan.

⁷⁴Dani Fittria Ulfa “*Penegakan Hukum Yang Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan*”, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Mushaf Al-Kamil *Al-Quran Dan Terjemahnya* Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS Al-Baqarah

Undang-Undang :

Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan Dan Illegal Logging*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008).

N.N, *Undang-Undang Kehutanan Dan Ilegal Logging*, (Bandung, Fokus Media, 2011.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politeia,1986).

Pasal 1 Ayat UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 Ayat (2).

Buku :

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Abduk Kadir Muhammad, *“Hukum Dan Penelitian”* (Bandung PT. Cipta Aditya Bakti, 2004)

Fathoni Abdurrahmat, *“Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,”* (Jakarta: Rineks Cipta)

Mulyana Agus, Dkk, *“Ruang Adaptif Refleksi Penataan Zona/blok di kawasan konservasi,”* (Jakarta, Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, 2019)

Hanafi Ahmad, *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam,” Cet. Ke-6,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)

Ahsin Sakho Muhammad Dkk (Ed), *“Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi’ah)”*.

Alam Setia Zain, *“Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana”*.

Syariati Ali, *“Ummah Dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autentisitas Ideologi Dan Agama,”* (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), Cet. 2.

Yafie Alie, *“Merintis Fiqih Lingkungan Hidup,”* (Jakarta: Tama Printing 2006).

Syarifuddin Amir, *“Garis-Garis Besar Ushul Fiqh”* (Jakarta Darul Falah, 2007)

Amirudin. Dkk, *Kecamatan balik bukit dalam angka 2018,* (BPS kabupaten lampung barat 2018)

Rosidi Anwar Dkk, *“Tafsir Al-Maragi,”* (Semarang, 1992).

Arief Arifin. *“Hutan dan kehutanan TNBBS,”* (Lampung Barat : focus media, 2017)

Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana I,”* (Semarang, Focus Media, 2008)

Hanafi Ahmad, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang)

Beliau Adalah Ali Bin ‘Aqil Bin Muhammad Abu Al-Wafa’ Al-Zhihari, Salah Seorang Tokoh Terkenal Satu-Satunya Di Jamannya, Alim, Penukil Dan Cerdas. Menulis Kitab Yang Sangat Masyhur, “*AL Funun*” Lebih Dari 400 Jilid. Sayangnya Beliau Menyelisihi Manhaj Salaf Dan Sejalan Dengan Manhaj Mu’tazilah Dalam Banyak Hal. Namun Setelah Itu Beliau Mengumumkan Taubatnya Dari Manhaj Mu’tazilah Serta Menulis Buku Yang Membantah Mereka. Dalam Rapung Samuddin.

Narbuko Cholid Dan Ahmadi Abdu, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Mangunjaya Majeri Fachruddin, “*Ekopesantren Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*”, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Irfan Nurul, “*Fiqh Jinayah*” (Jakarta, Fokus Media, 2012).

Abdurrahman Hafidz, *Lanjah Tsaqofiyah DPP HTI Kepolisian Dalam Negara Khilafah*, (Jakarta, 2017).

Hasan Ibrahim, “*Sejarah Kebudayaan Islam*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. 1.

Juliansyah Noor, “*Metode Penelitian*” (Jakarta, Kencana, 2011).

Kadaryanto, Dkk., “*Biologi 1 (Mengungkapkan Rahasia Alam Kehidupan, SMP Kelas VII)*”, (Jakarta, Yudistira, 2006)

Khamami Zada, *“Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam”*, (Jakarta,Erlangga,2008).

Hasan Iqbal Muhamamad, *“Metode Penelitian Dan Aplikasinya”*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,2002).

Sila Mappatoba, Nuerani Sitti, *“Perlindungan Dan Pengamanan Hutan”*, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009).

Muhammad Abdul Kadir, *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *“Juz 8,(Mauqi’u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah”*, 2005).

Iqbal Muhammad, *“Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001).

Mulyana Agus, dkk, *“Ruang Adaktif : Refleksi penataan zona /blok di kawasan konservasi, PIKA KSDAE”*, (bogor, 2019).

Sjadzali Munawir, *“Islam dan Tata Negara”*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990).

Prasetya Irawan, *“Logika Dan Prosedur Penelitian”* (Jakarta, Setiawan Pers, 1999).

Rapung Samuddin, *“Fiqh Demokrasi”*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).

Sahid, HM. *“Legislasi Hukum Islam Di Indonesia”*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016).

Saifullah, *“Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati”*, (UIN Malang Pres, Malang, 2007).

Salim H.S. *“Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.)

Setia Zain Alam, *“Hukum Lingkungan Konservasi Hutan”*, (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 1997).

Siswanto Sunarso, *“Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa”* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005).

Sugiono, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Arikunto Suharsimi, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”* (Jakarta: Renika Cipta, 2010).

Jurnal/skripsi

Fikri, *“Jurnal Ilmu Hukum Penerapan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kawasan Leuser”*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Banda Aceh, 2012.

Fachrurroji Moch , *“Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah”*, Dalam Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, Yang Mengutip Dari Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994)

Fitrian Noor, *“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Fiqh Al-Bi'ah”*, Universitas Brawijaya, Vol 3 Nomor 1.

Zain, Alam Setia. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. (Jakarta), Penerbit ; Rineka Cipta.

Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan Dan Penterjemah Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Depag RI, 2000.

Shihab Quraish Muhammad, "*Tafsir Al-Mishbah, Volume 4*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Prenada Mendia Group, 2014).

Salim, "*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*". (Surabaya, Focus Grafika, 2010)

Supriadi, "*Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3. – Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Wawancara :

Wawancara dengan bapak Muhammad Hafzi, Anggota polisi kehutanan TNBBS resort balik bukit lampung barat, tanggal 22 desember 2019.

Wawancara dengan bapak Wiwin, Anggota polisi kehutanan TNBBS resort balik bukit lampung barat.

Wawancara dengan ibu Dyah Nurfitri, Anggota Polisi kehutanan Resort balik bukit, 22 desember 2019.

Utami, Konservasi Sumber..

Wahab Afif, Hukum Pidana Islam, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967).

Wawancara penulis dengan bapak Sutoyo warga pekon kubu perahu pada 24 desember 2019

Wawancara penulis dengan bapak Zaini warga pekon kubu perahu, pada 23 desember 2019

Observasi penulis pada pemukiman disekitar kawasn hutan lindung TNBBS desa kubu pekhahu dan sekitarnya.

Media Online :

http://Www.Dpr.Go.Id/Dokjadih/Document/Uu/UU_2013_18.Pdf//Undang-Undang

<Http://Www.Biology-Online.Org/Dictionary/Conservation>, Diakses Pada 8 February 2020, Jam 15.55.

